Implementasi Sanksi Ekonomi Pemerintah Inggris Terhadap Rusia di Liga Sepak Bola Inggris pada Tahun 2022-2023

Frequency of International Relations
September, Vol 7 (1) 96 - 132
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track:
Submitted: June 28, 2025
Accepted: July 31, 2025
Available On-line: August 16, 2025

Evantio Yudhistira
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta
Evantioyudhistira123@gmail.com
Puguh Toko Arisanto
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta
ptas002@gmail.com

Abstract
This study examines how UK government-imposed sanctions on Russia-affiliated actors in the English Premier League (EPL) during the 2022–2023 period in response of Russian's invasion of Ukraine. Not only had UK government targeted Russia government, they also expanded sanctions on Russia-affiliated actors in domestic level. This study employs qualitative approach and data are derived from literature reviews as e-books, journal articles and relevant websites. As concepts of issue linkage and smart sanction are proposed, authors seek to analyze how UK government implemented sanctions to Russia-affiliated actors in English football. Authors found that UK Government took advantages of *issue linkage*, particularly *negative linkage* as football, a strategic coupling of foreign policy issues to intensify pressure through expanded sectoral coverage. The UK Government imposed smart sanctions including asset freezes, restrictions on ownership and new investments, termination of *sponsorship* agreements, and limitations on financial services targeting clubs affiliated with Russia, such as Chelsea FC, Everton FC, and Arsenal FC. These sanctions brought about financial instability, disrupted commercial operations, and led to changes in club ownership. The study also found that the pressure from these sanctions prompted both the UK Government and the Premier League to strengthen regulations on foreign ownership transparency and investment oversight, marking a shift toward stricter control in the English football industry.

Keywords: economic sanctions; English Premier League; Russia; smart sanctions; issue linkage

Pendahuluan

Sepak bola telah bertransformasi menjadi sebuah fenomena sosial global yang merepresentasikan kekuatan budaya, ekonomi, bahkan politik. Sepak bola bukan lagi sekadar hiburan atau aktivitas fisik, melainkan menjadi identitas, keyakinan, politik, dan bisnis yang dirayakan oleh jutaan orang di seluruh dunia melalui atmosfer penuh emosi dan kebahagiaan. Fenomena ini menempatkan sepak bola sebagai bagian integral dari industri global yang sangat besar dan kompleks (Yiapanas, Thrassou & Vrontis, 2023).

Kemajuan pesat industri sepak bola juga memunculkan perdebatan mengenai apakah dunia sepak bola bisa steril dari pengaruh politik atau malah sebaliknya. Secara normatif, badan tertinggi sepak bola dunia, Federation Internationale de Football Association (FIFA), menyatakan bahwa sepak bola harus menjadi ruang yang netral dan terbebas dari intervensi politik. Hal ini ditegaskan dalam statuta FIFA Pasal 4, yang menyatakan larangan keras terhadap segala bentuk diskriminasi politik, agama, atau ras dalam kegiatan sepak bola (FIFA, 2022). FIFA menganggap bahwa nilai-nilai olahraga, khususnya sepak bola, harus dijaga sebagai sarana membangun solidaritas, persatuan, dan perdamaian global. Esensi universalitas tersebut diyakini dapat tercemar apabila sepak bola dijadikan instrumen politik praktis yang bertentangan dengan prinsip sportivitas dan inklusivitas.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, memisahkan sepak bola dari politik merupakan tantangan besar. Kenyataan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa sepak bola sering digunakan sebagai instrumen politik, baik secara simbolik maupun langsung. Beberapa kasus menonjol seperti penolakan keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U-20 oleh sejumlah tokoh di Indonesia, atau intervensi moral yang dilakukan oleh pesepakbola Didier Drogba dalam konflik sipil di Pantai Gading, membuktikan bahwa kekuatan simbolik sepak bola sangat besar dalam memengaruhi opini publik dan arah kebijakan negara (Pamungkas, 2018). Bahkan dalam konteks sejarah global, Perang Sepak Bola antara Honduras dan El Salvador pada tahun 1969 menjadi bukti nyata bahwa konflik politik dapat menyulut ketegangan melalui medium sepak bola.

Salah satu negara yang menyita perhatian dunia dalam hal sepak bola dan politik adalah Inggris yang terkenal memiliki liga sepak bola paling menarik dan diminati oleh banyak penikmat sepak bola dunia. Inggris memiliki liga sepak bola paling kompetitif yakni English Premier League (EPL). Kompetisi ini tidak hanya menyuguhkan pertandingan yang ketat dan tidak terprediksi, tetapi juga menarik perhatian penonton dari seluruh dunia berkat kualitas penyiaran yang tinggi dan waktu tayang yang strategis, khususnya untuk pasar Asia yang merupakan basis terbesar penggemar sepak bola global (Pongoh,

2022). Keberhasilan liga ini dalam menjaga daya saing antar klub juga menjadi magnet bagi para investor dan pengusaha internasional untuk menanamkan modalnya dalam bentuk kepemilikan klub.

Hingga tahun 2023, banyak klub besar di EPL yang dimiliki oleh pengusaha asing. Contohnya adalah Manchester City yang dimiliki oleh pengusaha asal Uni Emirat Arab, Chelsea FC yang dimiliki oleh Todd Boehly dari Amerika Serikat, hingga Manchester United yang dikuasai oleh keluarga Glazer dari Amerika Serikat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola Inggris telah menjadi komoditas global yang melibatkan arus modal lintas negara dan menjadi bagian dari diplomasi ekonomi global. Dalam bukunya *The Billionaire Club*, James Montague menegaskan bahwa kepemilikan klub sepak bola tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial, tetapi juga prestige sosial dan pengaruh politik, yang menjadikan sepak bola sebagai panggung kekuasaan non-tradisional (Sutasman, 2019).

Namun majunya perkembangan EPL tidak mengisyaratkan bahwa sepakbola dapat lepas dari kepentingan politik. Merespon invasi Rusia ke Ukraina 2022, selain memberikan sanksi ekonomi kepada pemerintah Rusia, Inggris juga memberikan sejumlah sanksi kepada aktor-aktor Rusia di Inggris dalam ranah sepakbola yang terafiliasi dengan pemerintah Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina diawali dengan pelatihan militer di area perbatasan Rusia-Ukraina. Rusia akhirnya

melakukan invasi militer ke wilayah Ukraina pada akhir Februari 2022. Invasi tersebut menimbulkan krisis kemanusian yang besar dan menyebabkan kematian dan pengungsian secara masif 2022 (Evantio, Syifa, & Puguh, 2024).

Penulis melihat bahwa pemerintah Inggris telah menjatuhkan sanksi tidak hanya kepada pemerintah Rusia, tetapi juga kepada aktor, pengusaha, dan warga Rusia yang memiliki aset atau peran dalam liga sepak bola Inggris. Tindakan ini mencerminkan posisi Inggris sebagai negara yang mendukung Ukraina dan menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam menanggapi invasi Rusia di Ukraina. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Inggris mencerminkan kebijakan politik dan ekonomi mereka di tengah ketegangan yang terjadi. Respon berupa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada hubungan internasional, tetapi juga akan memengaruhi dinamika industri sepak bola di Inggris. Ini menggarisbawahi kenyataan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan arena yang dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik dan keputusan politik internasional. Penelitian ini menghubungkan geopolitik global dengan sektor olahraga, khususnya sepak bola di Inggris yang memiliki peran strategis sebagai industri global. Oleh sebab itu, penulis hendak menganalisis bagaimana pemerintah Inggris mengimplementasikan

sanksi terhadap aktor-aktor Rusia di liga sepak bola Inggris atas invasinya di Ukraina.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena dianggap relevan untuk mengkaji fenomena yang bersifat kompleks, seperti keterkaitan antara kebijakan sanksi ekonomi pemerintah Inggris terhadap Rusia dengan dinamika yang terjadi di Liga Sepak Bola Inggris. Fokus penelitian ini tidak hanya sebatas pada aspek kebijakan luar negeri, tetapi juga pada implikasi ekonomi dan sosial-politik dalam ranah olahraga internasional. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah dan organisasi internasional (seperti FIFA dan UEFA), serta artikel dari media yang kredibel.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yakni *issue linkage* dan *smart sanction.* Haas (1990) mendefinisikan *issue linkage* sebagai proses negosiasi yang melibatkan lebih dari satu isu dalam negosiasinya. Selanjutnya, Poast (2011) mendefinisikan *issue linkage* sebagai sebuah strategi diplomasi suatu negara yang menghubungkan dua atau lebih isu dalam kebijakan luar negerinya, yang tidak hanya untuk meningkatkan kerja sama, tetapi juga untuk

memperluas dampak tekanan atau sanksi terhadap pihak lain (Poast, 2011). *Issue linkage* dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni *positive linkage* dan *negative linkage* (Poast, 2011). *Positive linkage* terjadi ketika dua atau lebih isu dikaitkan untuk menciptakan insentif bagi kerja sama, di mana negara-negara memperluas manfaat bersama dalam negosiasi agar lebih menarik bagi semua pihak yang terlibat (Sebenius, 2009). *Negative linkage* digunakan untuk meningkatkan tekanan melalui ancaman atau sanksi dengan menghubungkan suatu isu dengan konsekuensi negatif di sektor lain. Strategi ini sering digunakan dalam diplomasi koersif untuk memperbesar dampak sanksi dan membatasi ruang gerak negara target dalam berbagai aspek kebijakan (Morrow, 1992). Pendekatan *Negative linkage* sering dikaitkan dengan konsep diplomasi koersif, di mana negara menggunakan ancaman yang kredibel untuk mempengaruhi perilaku negara lain tanpa perlu menggunakan kekuatan militer secara langsung (Fergus, Currey, & Tracy, 2019).

Sedangkan *smart sanction* atau sanksi cerdas, sebagai salah satu jenis dari sanksi ekonomi menjadi instrumen penting dalam diplomasi modern (David & George, 2002). Konsep tersebut berasal dari kritik terhadap sanksi ekonomi tradisional yang sering berdampak buruk kepada masyarakat dan cenderung tidak secara signifikan memengaruhi elit-elit penguasa di negara target (David & George,

2002). Berbeda dengan sanksi ekonomi konvensional yang sering berdampak luas terhadap masyarakat umum, sanksi terarah bersifat selektif, menyasar individu, kelompok, atau entitas tertentu yang dianggap memiliki pengaruh signifikan atau memiliki keterkaitan erat dengan negara yang sedang berkonflik. Fokus dari sanksi ini adalah untuk memberikan tekanan langsung kepada aktor-aktor tersebut agar mengubah kebijakan atau perilaku tanpa menyebabkan penderitaan besar pada populasi sipil.

Sanksi cerdas dirancang berdasarkan prinsip efisiensi dan presisi, bertujuan untuk meminimalkan dampak yang tidak diinginkan. Bentuk sanksi yang umum diterapkan antara lain (Gary, Jeffrey, Kimberly, & Barbara, 2007):

1. Pembekuan aset terhadap kekayaan individu atau entitas tertentu yang berada di luar negeri, untuk membatasi akses mereka terhadap sumber daya keuangan.
2. Larangan perjalanan kepada aktor yang disanksi memasuki negara tertentu, yang seringkali bertujuan mengisolasi mereka secara internasional.
3. Deportasi kepada individu yang terkait dengan rezim atau kelompok yang dikenai sanksi.

4. Pembatasan aktivitas sektor tertentu seperti embargo teknologi, energi, atau senjata, yang secara khusus dirancang untuk melemahkan pengaruh atau sumber daya mereka.

Hasil dan Pembahasan

Sanksi Ekonomi di Liga Sepak Bola Inggris Sebagai Implementasi *Issue Linkage*

Pasca invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Inggris memutuskan untuk memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi yang luas dan terkoordinasi terhadap Rusia. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Inggris untuk mempertahankan tatanan internasional, tetapi juga bertujuan untuk menghentikan agresi Rusia dan menekan pemerintahnya melalui penggunaan penalti ekonomi yang sistematis. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk merusak kemampuan Rusia dalam melanjutkan operasi militer dan memperlemah dukungan domestik terhadap kebijakan luar negerinya (Zulfa, Arisanto & Khansa, 2022). Langkah-langkah yang diambil oleh Inggris mencakup berbagai sektor strategis, seperti sektor energi dan perdagangan (Ivan, 2022).

Dengan Rusia yang menjadi salah satu penyedia utama minyak dan gas ke Eropa, langkah-langkah Inggris bertujuan untuk merusak sumber pendapatan utama pemerintah Rusia. Inggris mengumumkan

larangan bertahap terhadap impor minyak Rusia dan berharap untuk menghentikan semua pembelian energi dari Rusia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini secara khusus menargetkan pengurangan ketergantungan negara-negara Barat terhadap pasokan energi Rusia yang tidak hanya bertujuan untuk memotong pendapatan negara tetapi juga menurunkan kapasitas pasokan energi Rusia ke Eropa yang pada gilirannya diharapkan akan memengaruhi keputusan politik (Siti, 2023).. Langkah ini bertujuan untuk menekan pendapatan ekspor Rusia dari sektor strategis tersebut dan secara tidak langsung memberikan beban ekonomi yang signifikan melalui peningkatan biaya masuk barang ke pasar Inggris (Aulia, 2022).

Inggris juga membatasi ekspor ke Rusia, melarang penjualan sebanyak mungkin teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Ini mencakup berbagai peralatan yang dapat digunakan dalam sektor energi yang bertujuan untuk memperlambat kemampuan Rusia dalam mengembangkan lapangan minyak dan gas baru (Ivan, 2022). Selanjutnya, kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Inggris difokuskan pada sejumlah komoditas strategis, termasuk bahan kimia, plastik, karet, dan mesin. Dengan menghentikan pasokan barang-barang tersebut, Inggris berupaya mengganggu stabilitas produksi domestik Rusia dan memperlemah kapasitas teknologinya (Aulia, 2022).

Sanksi yang dijatuhkan oleh Inggris terhadap Rusia, terutama setelah invasi Rusia di Ukraina pada tahun 2022, memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan politik negara tersebut. Sanksi-sanksi ini secara langsung berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi Rusia. Proyeksi dari Bank Dunia menunjukkan bahwa ekonomi Rusia diperkirakan menyusut hingga 10% pada tahun 2022, sementara inflasi melonjak, menyebabkan peningkatan harga barang-barang pokok (Bloomberg, 2022). Sanksi yang dijatuhkan Inggris juga menyebabkan meningkatnya isolasi internasional bagi Rusia. Inggris secara tegas melarang impor minyak dan gas dari Rusia, mempengaruhi pendapatan negara secara langsung. Banyak perusahaan asing menghentikan operasional di Rusia, yang menyebabkan hilangnya investasi penting dan mengurangi lapangan kerja di dalam negeri. Penurunan pendapatan dari sektor energi sangat mempengaruhi perekonomian Rusia yang sangat bergantung pada minyak dan gas untuk sumber pendapatan utama (Aulia, 2022).

Pemerintah Inggris juga berupaya untuk dapat meningkatkan tekanan sanksi kepada Rusia dengan cara menghubungkan isu lain. Sanksi ini tidak berdiri sendiri sebagai respon ekonomi, melainkan bagian dari strategi yang dikenal sebagai *issue linkage*. Konsep *issue linkage* merujuk pada pengaitan dua atau lebih isu kebijakan luar negeri yang bertujuan memperkuat efektivitas tekanan politik dan

ekonomi melalui perluasan sektor yang terkena dampak (Poast, 2011). Pemerintah Inggris menggunakan pendekatan *negative linkage* ini ketika menghubungkan isu konflik geopolitik invasi Rusia dengan sektor olahraga, yaitu liga sepak bola Inggris sebagai bagian dari sanksi ekonomi guna memperbesar tekanan terhadap Rusia. Sanksi pada sektor yang lebih luas termasuk olahraga menunjukkan bahwa *issue linkage* digunakan untuk meningkatkan efektivitas sanksi dengan memperluas ruang lingkup efek tekanan dari sektor tradisional menuju sektor dengan nilai simbolik dan eksposur global yang tinggi.

Sektor olahraga, khususnya sepak bola dipilih sebagai target sanksi karena liga Inggris merupakan industri global yang menghubungkan berbagai elemen ekonomi, sosial, dan politik dalam satu ekosistem yang sangat terlihat publik. Hal ini terlihat jelas dari sanksi terarah (*smart sanctions*) yang membatasi investasi, kepemilikan, dan *sponsorship* oleh individu dan entitas Rusia dalam liga tersebut. Dengan demikian, olahraga menjadi instrumen politik untuk memutus pengaruh Rusia secara penuh mulai dari cara tradisional, seperti investasi dan kepemilikan klub hingga dukungan komersial dan *sponsorship* yang semuanya sangat penting untuk menjaga citra dan pengaruh Rusia di arena internasional (Bacheschi, 2023).

Implementasi *Smart Sanction* Pemerintah Inggris di Liga Sepak Bola Inggris

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh pemerintah Inggris terhadap aktor-aktor Rusia di Liga Sepak Bola Inggris merupakan bentuk sanksi cerdas atau yang biasa dikenal dengan *smart sanctions* (David & George, 2002). Sanksi ini secara khusus menarget individu dan entitas yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Rusia serta terlibat dalam kepemilikan, investasi, atau sponsor di liga tersebut. Pendekatan ini berfokus pada penargetan yang presisi guna memberikan tekanan maksimal pada aktor yang berperan strategis, tanpa menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat umum atau sektor lain yang tidak terkait. Strategi ini sekaligus menjadi bagian dari kebijakan diplomasi koersif yang lebih luas, di mana sektor olahraga dimanfaatkan sebagai medium untuk menyampaikan tekanan politik dan ekonomi secara efektif.

Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAML Act 2018) disusun dan disahkan oleh pemerintah Inggris untuk memberikan kerangka hukum yang kuat dan independen dalam penetapan sanksi serta pencegahan pencucian uang. Undang-undang ini merupakan respons terhadap tantangan global, kebutuhan nasional, dan dinamika internasional yang terus berubah. Salah satu latar belakang utama dari SAML Act 2018 adalah untuk memastikan kepatuhan Inggris terhadap

kewajiban internasional, khususnya yang berasal dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perjanjian internasional lainnya (Legislation.gov.uk, 2018). Sebagai anggota komunitas internasional, Inggris berkewajiban memberlakukan sanksi terhadap negara atau individu yang dinyatakan melanggar hukum internasional atau mengancam perdamaian dunia. Selain itu, undang-undang ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional Inggris, termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, menjaga keamanan nasional, serta mendukung perdamaian dan stabilitas internasional. Dalam konteks ini, pemerintah Inggris diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sebagai bagian dari strategi untuk merespons situasi konflik bersenjata, mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan mempromosikan penegakan hukum humaniter internasional serta tata kelola pemerintahan yang baik.

SAML Act 2018 juga berfungsi sebagai alat penting dalam kebijakan luar negeri Inggris dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dengan undang-undang ini, Inggris dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus tekanan diplomatik terhadap rezim yang represif. Selain itu, undang-undang ini mengatur pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, mencerminkan komitmen Inggris dalam

mendukung integritas sistem keuangan global melalui implementasi standar internasional yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) (Legislation.gov.uk, 2018). Sebagai hasilnya, SAML Act 2018 tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum domestik tetapi juga bagian dari sistem kerja sama global dalam memberantas kejahatan transnasional. Keberadaan undang-undang ini juga terkait erat dengan kebutuhan Inggris pasca-Brexit untuk memiliki kerangka hukum otonom yang tidak lagi tergantung pada kebijakan sanksi Uni Eropa. Dengan adanya SAML Act 2018, Inggris dapat secara cepat dan fleksibel menetapkan sanksi sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Sebagai langkah konkret dari ketentuan yang ada dalam SAML Act 2018, pemerintah Inggris menetapkan *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations* 2019. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina, khususnya pasca-Brexit. Latar belakang utama dari kebijakan ini adalah meningkatnya agresi Rusia terhadap Ukraina, yang dimulai dengan aneksasi wilayah Krimea pada tahun 2014 dan diperparah oleh invasi besar-besaran yang dimulai pada 24 Februari 2022. Tujuan utama dari *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations* 2019, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 regulasi tersebut, adalah untuk mendorong Rusia menghentikan tindakan yang mendestabilisasi Ukraina serta mempromosikan pembayaran kompensasi oleh Rusia kepada Ukraina

atas kerugian yang timbul akibat invasi tersebut (Legislation.gov.uk, 2019). Sanksi yang diterapkan melalui regulasi ini berfungsi sebagai instrumen tekanan diplomatik dan ekonomi yang digunakan Inggris untuk memperjuangkan keadilan bagi Ukraina serta menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Kebijakan ini juga mencerminkan transisi Inggris menuju sistem kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih mandiri pasca-Brexit. Inggris merasa perlu memiliki kebijakan sanksi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan geopolitik global (Legislation.gov.uk, 2019). Dengan demikian, *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations* 2019 tidak hanya merupakan bagian dari strategi tekanan terhadap Federasi Rusia, tetapi juga menandai posisi tegas Inggris dalam membela hukum internasional, menjaga stabilitas kawasan Eropa Timur, serta mengukuhkan kedaulatan regulasinya dalam menetapkan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.

Implementasi *Smart Sanction* Pemerintah Inggris terhadap Aktor-Aktor Rusia di Liga Sepak Bola Inggris

1. Pembekuan Aset

Pembekuan aset merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan sanksi internasional maupun nasional yang bertujuan untuk membatasi akses dan pemanfaatan kekayaan pihak yang dikenai sanksi. Secara definisi, pembekuan aset berarti seluruh aset milik

individu atau entitas yang masuk dalam daftar sanksi diblokir sehingga tidak dapat digunakan, dijual, dipindahtangankan, ataupun dinikmati manfaatnya (UK Parliament, 2019). Aset yang dibekukan ini mencakup berbagai jenis, mulai dari properti seperti tanah dan bangunan, saham perusahaan, rekening bank, hingga bentuk aset lainnya seperti kendaraan, hak kekayaan intelektual, serta instrumen keuangan lainnya. Pasal yang mengatur pembekuan aset dapat ditemukan di *SAML Act* 2018, khususnya pada pasal mengenai "*financial sanctions*" dan "*asset-freeze*". Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam pembekuan aset setiap orang dilarang untuk bertransaksi atau "*dealing*" dengan dana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang yang ditunjuk (*designated person*) (Legislation.gov.uk, 2018). Hal ini berlaku ketika seseorang tahu, atau memiliki alasan yang wajar untuk menduga, bahwa mereka sedang berurusan dengan dana tersebut. Selain itu, dalam regulasi 11, *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations* 2019 menyatakan bahwa seseorang tidak boleh bertransaksi dengan aset yang dimiliki, dipegang, atau dikendalikan oleh orang yang ditunjuk (Legislation.gov.uk, 2019).

Dalam konteks ini, sanksi pembekuan aset dijatuhkan kepada beberapa individu-individu asal Rusia, yakni Roman Abramovich, mantan pemilik Chelsea FC, dikenakan pembekuan aset sehingga seluruh properti, saham, dan rekening banknya di Inggris tidak dapat

digunakan. Abramovich dikenakan sanksi berupa pembekuan seluruh asetnya di wilayah Inggris yang mencakup properti, saham perusahaan, dan rekening bank. Akibat dari langkah ini, Abramovich tidak dapat menjual, memindahkan, ataupun mengakses kekayaan yang dimilikinya di Inggris. Berdasarkan aset, tiga aset utama Abramovich yang dibekukan pemerintah Inggris ditaksir bernilai US$ 140 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun (Farhan, 2024) dan klub sepak bola Chelsea FC yang merupakan aset milik Abrahmovich juga termasuk dalam pembekuan tersebut. Lebih lanjut, menurut Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (2025), Abramovich dikenai sanksi karena dianggap memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah Rusia, serta dinilai telah memperoleh keuntungan finansial dan materiil dari kebijakan Kremlin. Ia juga dianggap turut mendukung dan memfasilitasi agresi militer Rusia terhadap Ukraina, baik secara langsung maupun tidak langsung (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, 2025).

Selanjutnya, Alisher Usmanov, seorang oligarki pro-Kremlin dan pendiri USM Holdings. Usmanov dikenakan sanksi pembekuan seluruh aset yang dimilikinya di Inggris, termasuk properti mewah seperti Beechwood House di London senilai £82 juta dan Sutton Place di Surrey, dengan total aset yang diperkirakan mencapai ratusan juta pound sterling (BBC, 2022) . Namun, banyak aset tersebut telah dipindahkan

ke dalam struktur kepemilikan kompleks seperti *irrevocable trust*, yang menyulitkan otoritas dalam menegakkan sanksi secara efektif. Dalam dunia sepak bola, Usmanov dikenal sebagai mantan pemegang saham besar Arsenal FC dan memiliki pengaruh besar di Everton FC melalui perusahaannya, USM Holdings. Usmanov telah menginvestasikan sekitar £60 juta di Everton FC melalui kesepakatan hak penamaan stadion dan sponsor fasilitas pelatihan di Finch Farm, serta sponsor lainnya seperti MegaFon dan Yota (Brown, 2018).

Alexander Grigoryevich Abramov, mantan Non-Executive Chairman dari Evraz PLC, sebuah perusahaan baja dan pertambangan besar yang terdaftar di Bursa Efek London. Abramov memiliki kekayaan bersih sekitar £4,1 miliar (sekitar $4,7 miliar) dan sanksi terhadap dirinya bertujuan untuk memutus dukungan finansial terhadap pemerintah Rusia melalui jaringan industrinya yang luas, khususnya di sektor ekstraktif, konstruksi, dan transportasi (Reuters, 2022).. Walaupun angka total aset yang dibekukan tidak diumumkan secara eksplisit, laporan menunjukkan bahwa ia dan rekannya, Alexander Frolov, memiliki investasi properti di Inggris senilai sekitar £100 juta (ukpol, 2022).

Pemerintah Inggris juga memberlakukan sanksi terhadap Sarvar Ismailov, mantan direktur Everton FC dan keponakan dari oligarki Rusia Alisher Usmanov, yang mencakup pembekuan aset dan larangan

perjalanan Meskipun nilai pasti dari aset Ismailov yang dibekukan tidak diungkapkan secara publik, laporan dari pemerintah Inggris menyebutkan bahwa Sarvar dan saudaranya, Sanjar Ismailov, memiliki properti di kawasan elit London seperti Highgate dan Hampstead Heath. Kepemilikan properti di area tersebut menunjukkan bahwa nilai aset yang dibekukan kemungkinan mencapai puluhan juta pound sterling (Gov.UK, 2022) .

2. Pembatasan Transaksi Keuangan

Pembatasan transaksi keuangan merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan sanksi yang melarang segala bentuk transaksi finansial yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat kepada individu maupun entitas yang dikenai sanksi. Larangan ini mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk transfer dana, penempatan investasi, pemberian pinjaman, dan layanan keuangan lainnya yang berpotensi mendukung aktivitas yang menjadi dasar pemberian sanksi (UK Parliament, 2019). Pembatasan terhadap transaksi keuangan diatur dalam SAML Act 2018 di bagian tentang sanksi keuangan. Beberapa ketentuan di dalamnya yakni larangan memberikan layanan keuangan kepada orang yang ditunjuk, yang mencakup penyediaan dana atau sumber daya ekonomi kepada orang tersebut. Dalam Pasal 3(1) menjelaskan jenis-jenis sanksi keuangan termasuk larangan

memberikan layanan keuangan kepada orang yang ditunjuk (Legislation.gov.uk, 2018).

Dalam bentuk sanksi pembatasan transaksi keuangan ini, beberapa individu-individu berikut dijatuhkan, seperti Roman Abrahamovich yang memiliki peran sentral dalam jaringan bisnis oligarki Rusia yang sangat terhubung dengan pemerintah Rusia dan lingkaran Kremlin (The Guardian, 2022). Akses Abrahamovich terhadap layanan keuangan seperti transaksi perbankan dibatasi, begitu pula larangan mengakses layanan *trust* yang biasa dipakai untuk pengelolaan aset (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, 2025).

Selanjutnya, Alisher Usmanov yang memiliki pengaruh signifikan dalam dunia sepak bola Inggris, baik sebagai pemilik saham maupun sponsor di beberapa klub Liga Inggris. Ia juga merupakan pendiri USM Holdings, konglomerat besar yang memiliki aset di berbagai sektor, termasuk media dan telekomunikasi (Faizi, 2022). Pemerintah Inggris memberlakukan pembatasan ketat terhadap transaksi keuangan yang dapat digunakan oleh Usmanov. Masih dalam lingkaran keluarga Usmanov, Sanjar Ismailov, keponakan Alisher Usmanov yang terlibat dalam pengelolaan bisnis keluarga juga dikenakan larangan transaksi keuangan sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan kontrol bisnis keluarga Usmanov (UK Parliament, 2019).

Alexander Grigoryevich Abramov, mantan Non-Executive Chairman dan direktur dari Evraz PLC, juga dijatuhkan pembatasan transaksi oleh pemerintah Inggris. Pembatasan transaksi ini diterapkan untuk mencegah dirinya dan perusahaannya memberikan dukungan finansial atau operasional yang menguntungkan pemerintah Rusia (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, 2025).

3. Larangan Kepemilikan dan Investasi Baru

Adanya larangan kepemilikan dan investasi baru oleh aktor Rusia dalam klub-klub Liga Inggris menyebabkan aktor (pebisnis) Rusia tidak dapat memperluas atau mengubah struktur kepemilikan yang berpotensi memperkuat pengaruh mereka dalam olahraga di Inggris (UK Parliament, 2019). Larangan terhadap kepemilikan dan investasi keuangan untuk orang yang terhubung dengan negara *target* diatur pada regulasi 5 The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 yang mempertegas larangan bagi individu atau entitas untuk memiliki atau mengendalikan orang yang terhubung dengan negara yang ditunjuk (Legislation.gov.uk, 2019).

Pemeriksaan kepemilikan klub dan calon investor dibuat semakin komprehensif melalui mekanisme seperti "*Owners' and Directors' Test*" yang diterapkan oleh Liga Premier. Mekanisme ini berfungsi untuk menilai secara ketat latar belakang dan sumber dana calon pemilik

guna mencegah peluang masuknya aktor asing yang berpotensi membawa pengaruh negatif atau risiko tambahan bagi liga dan klub-klub yang ada (Premier League, 2023). Larangan dan regulasi ini membatasi perluasan kepemilikan Rusia secara substansial.

Setelah pemerintah Inggris memberlakukan larangan kepemilikan klub sepak bola oleh individu dan entitas Rusia sebagai respons terhadap agresi militer Rusia terhadap Ukraina, sejumlah klub yang sebelumnya dimiliki oleh aktor Rusia kini telah beralih kepada pemilik non-Rusia. Salah satu contoh paling menonjol adalah Chelsea FC, yang sebelumnya dimiliki oleh Roman Abramovich, seorang oligarki Rusia. Pada Mei 2022, Chelsea FC dijual kepada konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly, seorang pengusaha asal Amerika Serikat, dengan nilai transaksi yang mencapai £4,25 miliar (The Guardian, 2022). Penjualan ini tidak hanya menghapus pengaruh Abramovich tetapi juga mencerminkan komitmen Inggris untuk menjaga integritas liga sepak bola dari intervensi asing yang kontroversial.

Di sisi lain, aktor Rusia yang kehilangan kepemilikan klub-klub di Inggris tidak tinggal diam. Alisher Usmanov, yang sebelumnya memiliki saham di klub Everton FC, mulai mengalihkan pelaburannya ke liga-liga lain setelah sanksi dikenakan. Liga Super Turki muncul sebagai tujuan baru yang menarik bagi oligarki Rusia, karena negara tersebut tidak menerapkan sanksi serupa. Usmanor dan para investor

Rusia lainnya berpeluang melabuhkan investasinya di klub-klub Turki seperti Fenerbache dan Galasataray yang dipandang dipandang lebih stabil dan bebas dari hukum yang ketat (Midle East Monitor, 2023).

Dengan adanya aturan ini, aktor Rusia yang berpotensi berinvestasi di liga sepak bola Inggris, seperti Dmitry Rybolovlev, seorang oligarki Rusia dan pemilik perusahaan Monaco Sport Invest (MSI), tidak dapat berinvestasi di klub-klub Inggris. Dmitry Rybolovlev memilih untuk fokus mengarahkan perhatian dan modal mereka ke liga-liga yang lebih ramah, seperti Liga Prancis yang dalam hal ini Dmitry Rybolovlev merupakan pemilik Klub Sepak Bola AS Monaco (Forbes, 2025). Selain itu, Liga-liga seperti Bundesliga di Jerman dan Serie A di Italia, di mana lingkungan investasinya lebih terbuka, menjadi pilihan utama bagi para oligarki Rusia. Misalnya, tepat setelah larangan kepemilikan di Inggris, fokus investasi berpindah ke tim-tim seperti AS Roma dan Inter Milan yang menyambut baik investor asing yang tertarik untuk menambah modal masuk.

4. Penghentian Kerjasama *Sponsorship*

Pemerintah Inggris menjatuhkan penghentian kerjasama *sponsorship* dengan individu atau entitas yang disanksi. Hal ini berdampak langsung terhadap penurunan sumber pendanaan klub dan melemahkan kemampuan Rusia (UK Parliament, 2019). Langkah penghentian ini muncul sebagai bagian dari strategi yang lebih luas

dalam mengawasi dan mengendalikan investasi serta dukungan finansial yang berasal dari aktor-aktor yang terkait dengan pemerintah Rusia, terutama sejak peningkatan ketegangan akibat konflik geopolitik global. Dalam *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019*, tidak terdapat ketentuan spesifik dengan label "penghentian kerjasama *sponsorship*." Namun, unsur tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang melarang penyediaan finansial atau dukungan terhadap individu atau entitas yang dikenakan sanksi. Larangan umum terkait kerjasama *sponsorship* dapat terintegrasi dalam peraturan mengenai larangan layanan keuangan dan larangan pengalihan sumber daya kepada individu atau entitas yang ditentukan. Dalam hal ini, Regulasi 9 “Menetapkan bahwa tidak ada orang yang boleh menyediakan layanan keuangan atau fasilitas kepada orang yang ditunjuk” dan Regulasi 27 “Mengatur penyaluran dana dan sumber daya lainnya yang terkait dengan individu atau entitas yang dikenakan sanksi” (Legislation.gov.uk, 2019).

Penghentian kerjasama *sponsorship* antara klub-klub Liga Inggris dan entitas yang terkait dengan oligarki Rusia, seperti Alisher Usmanov, memiliki dampak finansial yang signifikan. Salah satu contoh utama adalah Everton FC, yang sebelumnya menerima dukungan finansial substansial dari perusahaan-perusahaan milik Usmanov. Pada tahun 2017, USM Holdings, perusahaan milik

Usmanov, menandatangani kesepakatan lima tahun senilai £30 juta untuk hak penamaan fasilitas pelatihan Everton FC, yang kemudian dikenal sebagai USM Finch Farm. Selain itu, pada tahun 2020, USM membayar £30 juta untuk hak eksklusif atas penamaan stadion baru Everton FC di Bramley-Moore Dock. Kesepakatan ini memberikan USM opsi utama untuk menjadi sponsor nama stadion tersebut, meskipun pada akhirnya tidak terealisasi karena hubungan bisnis antara Everton FC dan perusahaan-perusahaan milik Usmanov dihentikan menyusul invasi Rusia ke Ukraina (Metro, 2022). Selain itu, perusahaan lain yang terkait dengan Usmanov, seperti MegaFon dan Yota, juga menjalin kemitraan dengan Everton FC. MegaFon menjadi sponsor utama tim wanita Everton FC dan sponsor lengan baju tim pria, sementara Yota menjadi sponsor lengan baju. Namun, semua hubungan komersial ini dihentikan oleh Everton FC pada Maret 2022 sebagai respons terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Usmanov oleh pemerintah Inggris dan Uni Eropa (BBC, 2022). Secara keseluruhan, nilai total investasi dan *sponsorship* Usmanov di Everton FC diperkirakan mencapai sekitar £60 juta, mencerminkan pengaruh finansialnya yang substansial dalam klub sebelum pemutusan hubungan akibat sanksi internasional.

Selain itu, perusahaan Curzon Square Limited, yang berperan dalam pengelolaan sponsor dan pendanaan klub-klub Liga Inggris dan mempunyai keterkaitan langsung dengan kepemilikan oligarki Rusia,

juga terkena dampak dari sanksi tersebut. Perusahaan ini termasuk dalam daftar entitas yang dikenai sanksi oleh pemerintah Inggris, yang menyebabkan penghentian kerjasama *sponsorship* dengan klub-klub Liga Inggris. Tidak semua perjanjian sponsor, termasuk yang melibatkan Curzon Square Limited, diumumkan secara terbuka besaran nilainya kepada publik. Umumnya, klub hanya mengumumkan nama sponsor beserta durasi kerja samanya, tanpa merinci nilai pasti kontrak atau jumlah dana yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Transparansi mengenai detail finansial *sponsorship* memang masih terbatas, sehingga publik hanya mendapatkan informasi umum terkait siapa sponsornya dan berapa lama kerja sama itu berlangsung. Namun, jika mengacu pada laporan The Athletic (2022), besaran angka sponsor di bagian depan jersey khusus untuk klub-klub papan tengah hingga bawah di Premier League diperkirakan mencapai sekitar £2-6 juta per musim (The Athletic, 2023). Estimasi ini menjadi acuan bagi banyak kalangan industri sepak bola untuk mengukur seberapa besar kontribusi sponsor terhadap pendapatan klub, meskipun nilai pastinya tetap bergantung pada negosiasi individu dan daya tarik masing-masing klub di mata calon sponsor.

5. Larangan Layanan Keuangan dan *Trust*

Pemerintah Inggris mengambil langkah tegas dengan memberlakukan larangan akses terhadap layanan keuangan dan *trust*

bagi individu dan entitas yang dikenai sanksi, khususnya yang terkait dengan Rusia. Larangan layanan keuangan dan trust diatur dalam pasal *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations* 2019 yang melarang penyediaan layanan keuangan kepada orang yang terhubung dengan entitas yang ditentukan, serta larangan untuk mengelola trust yang berhubungan dengan mereka. Ini termasuk tidak diizinkannya penyediaan jasa keuangan kepada individu atau entitas yang terhubung dengan negara atau individu yang dikenakan sanksi. Regulasi 3(1) dalam *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations* 2019 yang melarang secara eksplisit penyediaan layanan keuangan terkait dengan individu atau entitas terhubung dengan negara yang dikenakan sanksi (Legislation.gov.uk, 2019).

Kebijakan ini berpengaruh signifikan dalam memotong jalur pengelolaan aset melalui struktur *trust*, yang selama ini digunakan untuk mengelola miliaran aset kepemilikan klub sepakbola dan entitas olahraga di Inggris (UK Parliament, 2019). *Trust* seringkali dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya atau untuk menyamarkan aliran dana dalam pengelolaan kepemilikan klub. Dengan adanya larangan ini, akses ke layanan seperti bank dan pengelola trust yang terafiliasi dengan pihak yang disanksi diputuskan, sehingga mempersulit pengelolaan dan penyaluran dana secara tidak transparan. Langkah ini secara efektif

menghalangi individu maupun kelompok yang ingin mempertahankan kendali atas klub melalui mekanisme keuangan kompleks (The Guardian, 2022).

Dalam konteks sanksi larangan terhadap layanan keuangan dan *trust*, semua aktor Rusia yang terlibat dalam liga sepak bola Inggris terkena dampak kebijakan ini. Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Alexander Grigoryevich Abramov, Sanjar Ismailov, dan Curzon Square Limited merupakan individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh pemerintah Inggris. Meskipun sanksi-sanksi ini berdasarkan alegasi keterlibatan mereka dalam mendukung kebijakan Kremlin, ketegasan pemerintah Inggris dalam menerapkan langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen untuk menanggapi tindakan agresif Rusia terhadap Ukraina dan menjaga integritas sektor olahraga di Inggris (UK Parliament, 2019).

Dampak terhadap Industri Sepak Bola Inggris

Implementasi sanksi ekonomi pemerintah Inggris terhadap aktor-aktor oligarki Rusia dan entitas terkait dalam Liga Sepak Bola Inggris selama tahun 2022–2023 menghadirkan berbagai dampak yang signifikan di berbagai aspek, terutama pada manajemen klub, keuangan, dan kondisi ruang ganti pemain. Studi kasus pada klub-klub besar yaitu Chelsea FC, Arsenal FC, Everton FC, dan Bournemouth FC

menggambarkan kompleksitas isu dan bagaimana sanksi tersebut mengubah wajah klub-klub tersebut.

Chelsea FC merupakan klub yang paling terdampak. Chelsea FC mengalami perubahan drastis setelah Roman Abramovich, pemilik klub selama hampir dua dekade dengan investasi lebih dari £1,5 miliar, terkena pembekuan aset oleh pemerintah Inggris akibat sanksi (Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, 2025). Seluruh akses finansial klub yang dibatasi mengakibatkan hambatan dalam aktivitas operasi seperti transfer pemain, pembayaran gaji, serta pendapatan dari tiket dan merchandise. Proses penjualan Chelsea kepada konsorsium AS pimpinan Todd Boehly pada 2022 memicu restrukturisasi manajemen, termasuk direksi dan tim pelatih. Transisi ini membawa ketidakpastian besar di ruang ganti pemain, memicu tekanan psikologis dan gangguan konsentrasi, yang berimbas pada performa klub yang labil sepanjang musim 2022-2023 (The Guardian, 2022).

Arsenal FC, yang pernah dimiliki sebagian oleh oligarki Rusia Alisher Usmanov, merasakan dampak serupa dari pembekuan dan penghentian dukungan finansial akibat sanksi (Faizi, 2022). MegaFon, perusahaan telekomunikasi terkait Usmanov, menjadi sponsor utama yang kontraknya dihentikan (Sam & Oliver, 2022). Akibatnya, Arsenal FC mengalami penurunan pendapatan komersial yang signifikan

sehingga harus melakukan restrukturisasi anggaran dan mencari sumber pendanaan baru demi menjaga stabilitas finansial

Everton FC juga terdampak signifikan dengan hilangnya sponsor utama MegaFon di fasilitas Finch Farm akibat sanksi Inggris (Sam & Oliver, 2022). Hal ini mengganggu pembiayaan fasilitas dan operasional klub secara keseluruhan. Klub menjalankan upaya intensif mencari sponsor pengganti dan mengelola anggaran dengan ketat agar bisa mempertahankan stabilitas keuangan. Namun, pergantian pelatih yang terjadi di tengah ketidakstabilan keuangan memperparah situasi ruang ganti, menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan motivasi pemain yang berdampak pada performa selama musim berjalan.

Secara makro, sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap oligarki Rusia telah memengaruhi struktur kepemilikan klub di Liga Inggris secara signifikan. Sanksi-sanksi ini tidak hanya berfokus pada pembekuan aset individu tetapi juga menyebabkan perubahan besar dalam regulasi yang mengawasi kepemilikan dan investasi di klub-klub sepak bola. Liga Premier Inggris mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat mengenai transparansi kepemilikan dan sumber dana investasi (Premier League, 2023). Berdasarkan laporan dari Brand Finance (2021), Liga Inggris telah menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kebijakan pemantauan terhadap pemilik klub. Dengan meningkatnya kepedulian publik dan tekanan dari berbagai

pihak, liga kini mengharuskan semua calon pemilik untuk menjalani proses due diligence yang lebih ketat. Proses ini mencakup verifikasi menyeluruh tentang sumber dana, integritas keuangan, dan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap reputasi klub dan liga secara keseluruhan. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah terulangnya situasi di mana individu-individu yang berasal dari latar belakang kontroversial dapat dengan mudah membeli klub dan berinvestasi dalam liga (Brand Finance, 2021).

Dari sisi kompetisi, klub-klub yang terdampak sanksi mengalami ketidakstabilan sementara yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing dengan klub-klub non-Rusia seperti Manchester City dan Liverpool, yang tidak terdampak langsung. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh sanksi dan pergeseran kepemilikan ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam daya saing liga. Jika periode ketidakpastian ini berlanjut, klub-klub yang terdampak dapat kehilangan daya tarik bagi pemain dan penggemar, serta berpotensi mengalami penurunan performa di lapangan. Farizham (2024) menggarisbawahi bahwa ketidakstabilan keuangan yang dialami klub-klub yang sebelumnya dimiliki oleh oligarki Rusia dapat menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam kompetisi. Klub-klub seperti Manchester City dan Liverpool, dengan dukungan finansial yang kuat dan stabil, berpotensi mengambil keuntungan dari situasi ini, semakin

mengukuhkan posisi mereka di puncak Liga Premier Inggris. Selain itu, tekanan untuk menjalani proses restrukturisasi dan mencari pemilik baru yang sesuai dengan regulasi yang lebih ketat dapat memperlambat proses perkembangan klub-klub yang terdampak (Farizham, 2024).

Kesimpulan

Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi ekonomi terarah (*smart sanctions*) terhadap aktor-aktor Rusia di Liga Sepak Bola Inggris pada tahun 2022-2023 sebagai bentuk respon pemerintah Inggris terhadap invasi Rusia di Ukraina. Sanksi yang dijatuhkan kepada aktor atau entitas Rusia, berupa pembekuan aset, larangan kepemilikan dan investasi baru, penghentian kerjasama *sponsorship*, serta pembatasan transaksi keuangan dan *trust*. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada dampak ekonomi tradisional tetapi juga merupakan bentuk strategi menghubungan satu isu dengan isu lainnya (*issue linkage)* dengan menunjukkan bahwa sektor olahraga dapat dijadikan alat untuk menambahkan tekanan pada negara yang sedang berkonflik.

Dampak dari sanksi ini sangat terlihat pada klub-klub seperti Chelsea FC, Arsenal FC, dan Everton FC. Chelsea FC yang harus melakukan penjualan klub setelah pembekuan aset yang signifikan, mengalami ketidakstabilan finansial dan operasional. Arsenal FC dan Everton FC juga menghadapi tekanan serupa yang mengharuskan mereka untuk mencari sumber pendanaan baru, memicu

restrukturisasi dan penyesuaian operasional klub-klub tersebut. Lebih jauh, sanksi ini mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terkait transparansi kepemilikan asing di Liga Inggris, yang berpotensi mengubah dinamika investasi dan persaingan dalam liga.

Daftar Pustaka

BBC. (2022, Maret 22). *Alisher Usmanov: Oligarch says he ditched mansions before sanctions*. Diambil kembali dari BBC: https://www.bbc.com/news/business-60825983

Brand Finance. (2021, Mei 17). *Foreign Ownership in the Premier League*. Diambil kembali dari Brand Finance: https://brandfinance.com/insights/foreign-ownership-in-the-premier-league

Brown. (2018, Agustus 15). *What An Investment From Alisher Usmanov Could Mean For Everton*. Diambil kembali dari Forbes: https://www.forbes.com/sites/cybrown/2018/08/15/what-an-investment-from-alisher-usmanov-could-mean-for-everton/

David, C., & George, A. L. (2002). *Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft*. Rowman & Littlefield Publishers.

Evantio, Y., Syifa, B., & Puguh, T. A. (2024). Analisis teori realisme dan konsep krisis pangandalam perang Rusia-Ukraina 2022. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.

Faizi, L. (2022, Desember 9). *Profil Alisher Usmanov, Orang Islam Terkaya di Rusia yang Pernah Memiliki Saham Arsenal dan Alibaba*. Diambil kembali dari SindoNews: https://ekbis.sindonews.com/read/964827/36/profil-alisher-usmanov-orang-islam-terkaya-di-rusia-yang-pernah-memiliki-saham-Arsenal-dan-alibaba-1670577141

Farhan, K. A. (2024, Juni 6). *Profil Roman Abramovich: Kekayaan, Pasangan, hingga Kasus Hukum*. Diambil kembali dari inilah.com: https://www.inilah.com/roman-arkadyevich-abramovich

Farizham, A. (2024, Februari 21). *Begini Sejarah dan Awal Mula Premier League Menjadi Liga Inggris Hingga Sekarang*. Diambil kembali dari Garudasport: https://garudasport.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-3187698247/begini-sejarah-dan-awal-mula-premier-league-menjadi-liga-inggris-hingga-sekarang

FATF. (2018). *Guidance on Beneficial Ownership and Asset Freezing*. Paris: Financial Action Task Force.

FIFA. (2022, September). *FIFA LEGAL HANDBOOK*. Diambil kembali dari digitalhub.fifa.com: https://inside.fifa.com/legal/media-releases/fifa-publishes-2022-edition-of-legal-handbook

Fergus, H., Currey, E., & Tracy, B. (2019). *The Chinese Communist Party's coercive diplomacy*. Diambil kembali dari Australian Strategic Policy Institute: https://www.aspi.org.au/report/chinese-communist-partys-coercive-diplomacy?

Forbes. (2025, 5 22). *Dmitry Rybolovlev & family*. Diambil kembali dari Forbes: https://www.forbes.com/profile/dmitry-rybolovlev/

Gary, C. H., Jeffrey, J. S., Kimberly, A. E., & Barbara, O. (2007). *Economic Sanctions Reconsidered*. Washington DC: Peterson Institute For International Economics.

Gov.UK. (2022, Juli 26). *UK sanctions Russian officials propping up Putin's proxy administrations in Ukraine*. Diambil kembali dari GOV.UK: https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-russian-officials-propping-up-putins-proxy-administrations-in-ukraine?utm_source=chatgpt.com

Haas, E. B. (1990). *When knowledge is Power : Three Models of Change in International Organisations*. Berkeley: University of California Press.

Legislation.gov.uk. (2018). *Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018*. Legislation.gov.uk.

Legislation.gov.uk. (2019). *The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019*. Legislation.gov.uk.

Metro. (2022, Maret 2). *Everton suspend sponsorship from Russian companies owned by Alisher Usmanov*. Diambil kembali dari Metro: https://metro.co.uk/2022/03/02/everton-suspend-*sponsorship*-from-russian-companies-owned-by-alisher-usmanov-16202610/

Midle East Monitor. (2023, Maret 23). *Russian investors flocked to Turkiye in 2022 following Western sanctions*. Diambil kembali dari Midle East Monitor: https://www.middleeastmonitor.com/20230322-russian-investors-flocked-to-turkiye-in-2022-following-western-sanctions/

Morrow, J. (1992). Signaling Difficulties with Linkage in Crisis Bargaining. *International Studies Quarterly*. Vol.36, No.2.

Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury. (2025). *Consolidated List Of Financial Sanctions*. London: The House of Commons Library UK.

Pamungkas, G. N. (2018, November 10). *Didier Drogba, Hentikan Perang Saudara Lewat Sepakbola*. Diambil kembali dari Starting Eleven: https://startingeleven.id/didier-drogba-hentikan-perang-saudara-lewat-sepakbola/

Poast, D. P. (2011). *Issue Linkage And International Cooperation: An Empirical Evaluation*. Dissertations and Theses (Ph.D. and Master's) The University of Michigan Library, 52-56.

Pongoh, A. (2022, Februari 7). *Mengapa Liga Inggris Menjadi Liga Sepak Bola yang Paling diminati di Dunia?* Diambil kembali dari Kumparan: https://kumparan.com/abednego-pongoh/mengapa-liga-inggris-menjadi-liga-sepak-bola-yang-paling-diminati-di-dunia-1xSDwQWLQ8e/full

Premier League. (2023, Maret 30). *Premier League statement: Owners' and Directors' Test*. Diambil kembali dari Premier League.com: https://www.premierleague.com/news/3124956

Sam, A., & Oliver, R. (2022, Maret 2). *Everton FC suspends sponsorship deals with Usmanov-linked companies*. Diambil kembali dari Financial Times: https://www.ft.com/content/fc2843e2-36b0-49e0-b240-0a25f2062580

Sebenius, K. J. (2009). *Negotiation arithmetic: Adding and Subtracting Issues and Parties*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sutasman, T. R. (2019, Juni 17). *Memahami Alasan Para Orang Kaya Membeli Klub Sepakbola di Inggris*. Diambil kembali dari Ligalaga.id: https://ligalaga.id/football-culture/finansial/memahami-alasan-para-orang-kaya-membeli-klub-sepakbola-di-inggris-2/

The Athletic. (2023, 12 03). *Analysed: Every Premier League Club's Sponsorship deals*. Diambil kembali dari The Athletic: https://www.nytimes.com/athletic/4167575/2023/02/12/premier-league-shirt-sponsors/

The Guardian. (2022). *Chelsea frozen as UK sanctions Roman Abramovich over Russia-Ukraine war*. Diambil kembali dari The Guardian: https://www.theguardian.com/football/2022/mar/10/chelsea-sanctions-roman-abramovich-ukraine-war

UK Parliament. (2019). *UK Sanctions List (Russia): Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019*. London: UK Parliament.

Ukpol. (2022, November 2). *PRESS RELEASE : UK sanctions Russian steel and petrochemical tycoons funding Putin's war [November 2022]*. Diambil kembali dari Foreign & Commonwealth Office: https://www.ukpol.co.uk/press-release-uk-sanctions-russian-steel-and-petrochemical-tycoons-funding-putins-war-november-2022/?

Yiapanas, G., Thrassou, A., & Vrontis, D. 2023. The Contemporary Football Industry: A Value-Based Analysis of Social, Business Structural and Organisational Stakeholders. *Accounting, Auditing & Accountability Journal.* Vol. 37, No.2.

Zulfa, K. Amalia, Arisanto, P. Toko & Mahadana, K. Rulif. 2022. Analisis Sanksi Ekonomi terhadap Rusia atas Invasinya di Ukraina 2022. *Jurnal Transformasi GLobal.Vol. 9*, No.2.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.